



Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana untuk meningkatkan kesadaran hidup yang lebih baik di era global

Juliati ^{a,1*}, Wawan Hermawan ^{b,2}, Muhammad Firman ^{c,3}

^{a, b, c} Program Studi PPKn, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sukabumi, Indonesia

¹ juliaticiaul@gmail.ac.id*; way3069@gmail.com; firmanimani@gmail.com

*korespondensi penulis

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel:	Era globalisasi seolah-olah satu negara dengan negara lain ibarat sebuah kampung, karena setiap saat kita dapat memantau setiap perkembangannya salah satunya melalui berbagai media internet (pengaruh positifnya) bertambahnya pengetahuan, tetapi ada pula pengaruh negatifnya bagi remaja dan masyarakat umumnya seperti sekarang ini telah dihadapkan kepada krisis jati diri bangsa. Pada saat ini sekarang sikap dari kebiasaan warga negara sudah tergantikan dengan individualistis, materialistis, bahkan munculnya berbagai macam kekerasan telah tumbuh di sekeliling kita. Solusinya tiada lain untuk di Indonesia pendidikan kewarganegaraan harus disosialisasikan dan dibelajarkan kepada masyarakat.
Diterima : 28-01-2-19	
Revisi : 10-03-2019	
Dipublikasikan : 31-03-2019	
Kata kunci:	ABSTRACT
Globalisasi	<i>The era of globalization as if one country with another country is like a village, because every time we can monitor each development, one of them is through various internet media (positive influence), increasing knowledge, but there are also negative influences for teenagers and the general public to the crisis of national identity. Now, the attitude of citizens' habits has been replaced by individualistic, materialistic, even the emergence of various kinds of violence that have grown around us. The alternative solution in Indonesia, citizenship education must be socialized and taught to the community.</i>
Pendidikan kewarganegaraan	
Kesadaran hidup	
Keywords:	
Globalization	
Civic education	
Consciousness	

Copyright © 2019 Juliati, dkk. All Right Reserved

Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara termasuk di Indonesia dipahami secara berbeda-beda tergantung pada ideologi negara yang dianut. Dari kajian Print (1999) terhadap pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di Asia dan Pasifik, penamaan pendidikan kewarganegaraan sebagai *civic education* yang mencakup kajian tentang pemerintahan, konstitusi, *rule of law*, serta hak dan tanggung jawab warga negara dan *citizenship education* dengan cakupan dan penekanan kajian meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan keterlibatan warga dalam suatu *civil society* (masyarakat warga). Namun, bagi kebanyakan, kajian *civic education* memasukan pembelajaran-pembelajaran yang berhubungan dengan

institusi-institusi dan sistem yang melibatkan pemerintah, budaya politik (*political heritage*), proses-proses demokratis, hak-hak dan tanggung jawab warga negara, administrasi publik dan sistem peradilan (Print, 1999, hal. 11–12). Pada sisi lain, pendidikan kewarganegaraan tidak dapat berdiri sendiri, independen dari norma-norma budaya, prioritas politik, harapan sosial, aspirasi pembangunan ekonomi nasional, konteks geopolitik dan sejarah masa lalu (Lee, Grossman, Kennedy, & Fairbrother, 2004)

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian kurikulum. Hal ini untuk menyesuaikan fungsi dari misi dan visi guna membentuk warganegara yang lebih baik (*good citizenship*) yaitu dimulai

diberlakukannya pendidikan kewarganegaraan tahun 1957 dengan materi ketatanegaraan dengan fokus membentuk “*nation and character building*” dimana sekolah dianggap sebagai “*socio-political institution.*” seterusnya sekarang tahun 1968 diganti lagi kurikulumnya dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Hal ini didukung dengan diberlakukannya Ketetapan MPR Nomor II/ MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), karenanya PMP didominasi oleh bahan P4 dengan mengarah kepada indoktrinasi untuk pendidikan dan pelatihan warganegara sebagai produk formal.

Adapun istilah PMP berlaku sampai dengan pergantian kurikulum tahun 1984 menjadi tahun 1994. Pada kurikulum 1994 PKn berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Tahun 2004 berganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dan sekarang berlaku kurikulum tahun 2006, yang disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan nama yang sama yaitu PKn. Untuk selanjutnya walaupun PKn sudah tujuh kali mengalami pergantian, namun orientasi kandungannya masih tetap berkenaan dengan nilai-nilai Pancasila.

Terkait dengan kebijakan kurikulum pendidikan kewarganegaraan, Kennedy (2009) menyatakan bahwa kurikulum sekolah tidaklah netral karena merupakan hasil interaksi antara pemerintah, masyarakat dan pendidik professional yang saling memperebutkan pengaruh kepentingan. Tidak ada banyak kesepakatan tentang terminologi kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan penggunaannya dalam literatur (Grossman, Lee, & Kennedy, 2008). Sebagai contoh, Glatthorn (1999) mengidentifikasi delapan jenis kurikulum yang berbeda secara konseptual; “*hidden (unintended), excluded (what has been left out intentionally or unintentionally), recommended (advocated by experts), written (as found in official documents), sup-ported (as found in textbooks, software and media), tested (embodied in tests), taught (what teachers actually deliver), and learned (what students learn)*”. Pernyataan ini menjadi relevan ketika menyimak

perjalanan pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan, terutama pemerintah di sejumlah negara. Kepentingan pemerintah dalam kebijakan pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan, menjadikan bobot dan penempatannya dalam kurikulum sekolah menjadi berbeda-beda di setiap negara. Sebagai contoh, bobot dan kepentingan ideologi antara di Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina dapat mengarah kepada mata pelajaran tersendiri dan mata pelajaran wajib untuk mendukung pendidikan kewarganegaraan sebagai prasyarat memasuki universitas atau peran serta memasuki pasar kerja (Kennedy, 2009). Harus diakui bahwa semua negara-bangsa pasti menghendaki untuk menghasilkan warga negara yang baik, meskipun harus memayarnya dengan masa berlaku kurikulum atau nilai-nilai ideologis kepada lulusan sekolah. Dengan demikian, kebijakan kurikuler perlu mempertemukan kepentingan yang beragam tersebut untuk mewujudkan warga negara ideal bangsanya.

Pergantian kurikulum PKn di Indonesia tersebut dilakukan semata-mata sebagai perbaikan untuk menata negara supaya lebih baik lagi meskipun sekarang kenyataannya belum sepenuhnya terlaksana. Alasannya karena pada era reformasi ini banyak sekali permasalahan melalui gejolak yang timbul mengenai perubahan demokrasi. Terutama di saat sekarang kecenderungan universal permasalahan PKn banyak sekali bersinggungan dengan perubahan masyarakat yang mengglobal yang berlangsung sangat cepat. Tantangan global terhadap kewarganegaraan ini memunculkan ide dan gagasan teori kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di seluruh dunia. Walaupun demikian, ketika tantangan yang dihadapi hampir sama, namun dalam kenyataannya, pemaknaan mengenai kajian kewarganegaraan tiap negara berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat dalam perspektif sosial, politik dan hukum. Misalnya, konsep kewarganegaraan di negara liberal akan berbeda dengan konsep kewarganegaraan di negara-negara komunis.

Dari studi diatas perlu adanya pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang dapat mengatasi krisis dari pengaruh negatifnya globalisasi dari berbagai pengaruh budaya luar terutama dari segi moral untuk kalangan anak muda dan masyarakat. selain adanya proses globalisasi bila dilihat dari sisi ekonomi adalah dapat menjadi suatu perubahan di dalam perkembangannya maka secara positifnya dapat meningkatkan kadar hubungan dan saling ketergantungan selain mempertajam persaingan antar negara, karena tidak hanya di perdagangan internasional ekonomi tetapi di bidang pendidikan. Selainnya di bidang teknologi dan informasi telah terjadi suatu perubahan yang cepat. Pengaruh dari perkembangan teknologi komunikasi telah berpengaruh terhadap hampir pada seluruh kegiatan masyarakat informasi ini menembus ruang dan waktu dengan cepatnya. Dari perkembangan teknologi komunikasi namun kita harus dapat mengantisipasinya serta dapat memilah sekiranya mana yang baik untuk kita terapkan. Karena dengan kehadirannya dapat membius kita semua, sehingga menjadi terpedaya oleh tampilannya dan hal itu dapat saja terjadi kalau dalam pemikiran kita keadaannya sedang lemah. Untuk menghadapi berbagai gejolak pengaruh dari era globalisasi, maka posisi dari materi PKn harus dapat berperan lagi guna mempersiapkan hari esok yang lebih baik lagi. Begitu pula generasi muda kita harus memiliki kesadaran akan pengaruh dari dampak negatifnya era globalisasi. Permasalahan yang ada di masyarakat telah mengalami dinamika, hal ini harus diimbangi oleh materi PKn, sehingga lebih kontekstual dan hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat *informal content* seperti adanya kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu PKn harus dapat berperan sebagai wahana untuk meningkatkan kesadaran hidup yang lebih baik lagi.

Kini manusia modern, memasuki babak baru dalam zamannya era globalisasi (*late modernity*) dimana formasi sosial yang terbentuk mengalami transformasi menuju

formasi social sebagai masyarakat modern. Namun dari berbagai penerapan derasnya kemajuan teknologi komunikasi hendaknya masyarakat disertai dengan penerapan nilai-nilai karakter yang ada di dalam PKn mengingat sekarang banyaknya berbagai kasus permasalahan yang telah ada di masyarakat. Karena itu materi PKn hendaknya dapat lebih berperan sebagai wahana untuk meningkatkan kesadaran hidup yang lebih baik lagi terhadap sesama.

Metode

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Riset ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya (Zed, 2004). Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi pustaka saja tanpa memerlukan riset lapangan untuk memperoleh gambaran mengenai jawaban rumusan masalah. Studi literatur diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan pada rumusan masalah

Hasil dan Pembahasan

Kajian Pendidikan Kewarganegaraan

Tren perkembangan demokrasi membutuhkan pendidikan bagi warga negara dan menjadi salah satu tujuan sistem pendidikan selama bertahun-tahun. Pendidikan kewarganegaraan sebagai ilmu dan mata pelajaran diharapkan untuk mendapatkan kualitas kewarganegaraan aktif (*active citizenship*) bagi negara demokratis (negara yang menganut prinsip demokrasi). Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya terdiri dari pengetahuan, nilai dan keterampilan, tetapi juga mencakup penerapan pengetahuan, nilai, dan keterampilan dalam situasi kehidupan nyata dengan berpartisipasi secara aktif (Doğanay, 2012). Peran pendidikan kewarganegaraan secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang merupakan penekanan dalam istilah pendidikan kewarganegaraan,

melainkan juga membangun kesiapan warga negara untuk menjadi warga dunia (*global society*).

Melihat pada negara-negara maju, terdapat beragam jenis nomenklatur pendidikan kewarganegaraan di dalam program pendidikan di jenjang formasi pendidikan dasar dan menengah untuk membentuk warga negara sebagaimana harapan dari ideologinya. Kajian dari Kerr (1999) Bîrzéa (2000) mengenai pendidikan kewarganegaraan di Eropa secara eksplisit menyebutkannya pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib secara tersendiri sebagai *civics*, *civic education*, *education for citizenship*, maupun lintas bidang studi ataupun terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu seperti. Perbedaan ragam penyebutan nomenklatur dan pilihan kebijakan antara misi membangun warga negara yang baik melalui satu mata pelajaran (*separated subject*), terpadu dengan mata pelajaran lain (*integrated subject*) ataukah lintas kurikuler (*cross-curricular*), berkepada konteks masing-masing sistem pendidikan nasional suatu negara. Dengan demikian, letak persoalannya bukan apakah warga negara yang baik hanya dibangun melalui oleh mata pelajaran yang eksklusif menyebut pendidikan kewarganegaraan, namun setiap bidang kajian memiliki misi yang sama untuk membangun warga negara yang baik.

Meskipun diakui bahwa secara umum di beberapa negara, kewarganegaraan menjadi salah satu tujuan dan kajian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang menekankan pada nilai-nilai untuk menumbuhkan warga negara yang baik dan patriotik. Dari kajian Kerr (1999) terhadap pengembangan pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara maju di benua Eropa, Amerika, Australia maupun Asia, sebagian besar menyebutnya atau memasukannya dalam mata kajian *social studies*. NCSS (1994) memasukan kajian kewarganegaraan sebagai salah satu dari sepuluh tema kajian *social studies* yang memasukan pengalaman-pengalaman belajar yang memberikan kajian cita-cita, prinsip-prinsip, dan praktik kewarganegaraan dalam sebuah republik demokratis. Pemahaman

terhadap cita-cita kewargaan (*civic ideals*) dan praktik-praktik kewarganegaraan menjadi penting (kritis) untuk partisipasi sepenuhnya dalam masyarakat dan menjadi tujuan pokok *social studies* (National Council for Social Studies, 1994, hal. 30). Dasar pemikiran pentingnya kajian civic dalam program *social studies* ialah bahwa salah satu karakteristik utama *social studies* (di Amerika Serikat) adalah untuk mendukung kompetensi kewargaan (*civic competence*) meskipun kompetensi tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab *social studies*, namun kompetensi kewargaan menjadi lebih penting bagi *social studies* daripada mata pelajaran lainnya di sekolah-sekolah (National Council for Social Studies, 1994).

Siswa saat ini sebagai warga negara pada abad 21 ini harus memiliki apa yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan untuk membantu orang-orang muda memperoleh dan belajar untuk menggunakan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang akan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sepanjang hidup mereka.

Globalisasi dan Dampaknya bagi Warga Negara (Global)

Globalisasi merupakan fenomena beragam yang meliputi dimensi ekonomi, sosial, politik, teknologi dan budaya (Mir, Hassan, & Qadri, 2014). Globalisasi dalam berbagai bentuknya secara langsung melibatkan dua asumsi utama dalam ilmu-ilmu sosial, *pertama*, asumsi eksplisit atau implisit tentang negara-bangsa sebagai wadah proses sosial, dan *kedua*, *korespondensi* teritori wilayah nasional dengan nasional-asumsi bahwa jika suatu proses atau kondisi berada di lembaga nasional atau di wilayah nasional, itu harus bersifat nasional. Dari pembahasan di atas kedua asumsi tersebut menggambarkan kondisi yang telah bertahan, meskipun tidak pernah sepenuhnya, sepanjang sejarah negara modern, terutama sejak Perang Dunia I, dan sampai batas tertentu terus berlanjut.

Globalisasi tidak hanya dalam hal interdependensi dan institusi global tetapi juga dalam konteks nasional membuka agenda penelitian yang luas dan sebagian

besar tidak tertangani. Asumsi tentang negara-bangsa sebagai wadah proses sosial terus bekerja dengan baik untuk banyak mata pelajaran yang dipelajari dalam ilmu sosial dan memang memungkinkan ilmuwan sosial untuk mengembangkan metode analisis yang kuat dan kumpulan data yang diperlukan

Memasuki abad global, dimunculkan istilah bangsa kosmopolitan, yang dalam pandangan Giddens (2000) mengaburkan batas-batas negara secara tegas. Uni Eropa salah satu contoh bagaimana pengaburan batas negara terjadi di sana. Apakah kosmopolitan mengancam identitas nasional? Identitas nasional menurut Giddens (2000) tidak berbahasa apabila ia toleran terhadap ambivalensi atau *multiple nationality*. Bangsa-bangsa dalam pandangan kosmopolitan akan lebih peduli terhadap isu-isu global. Masyarakat era globalisasi terhubung satu sama lain melalui derasnya teknologi komunikasi sehingga negara yang satu dengan negara lainnya seperti sebuah kampung (*global village*). Artinya, menjadi warga global merupakan cara hidup yang mengakui dunia kita adalah jaringan koneksi dan interdependensi yang semakin kompleks. Salah satu di mana pilihan dan tindakan kita dapat berdampak pada orang-orang dan komunitas lokal, nasional atau internasional (Oxfam, 2015). Namun demikian, sebagai warga negara global, kita harus tetap dapat menghargai negara dan budaya kita sendiri. Untuk menjadi warga negara global kita tidak bisa berhenti belajar di setiap batas yang ada tetapi harus belajar lintas batas dan mempunyai keberanian mengubah pola pikir global dari sesuatu yang ideal menjadi kenyataan (Gerzon, 2010).

Ketika menjadi warga global dan menikmati globalisasi, secara status warga global tetaplah menjadi warga negara. Apabila ditelaah dari posisi negara dalam globalisasi, negara-bangsa merupakan entitas utama di dalam aspek kehidupan masyarakat, serta menjamin penciptaan kondisi untuk reproduksi ekonomi dan sosial. Dengan kata lain, negara menjamin hak milik, mengembangkan sistem hukum dan moneter; mengatur ekonomi dan menjamin ketersediaan tenaga kerja; menyediakan

infrastruktur seperti air, jalan, kereta api, listrik, hingga merawat individu yang membutuhkan melalui kebijakan sosial (Robertson, 1995).

Implementasi terhadap ide-ide dari kedua pandangan tersebut dalam tatanan global dapat dilihat dengan nyata saat ini. Penggunaan hak suara dalam pemilihan presiden dapat menjadi contoh nasionalisme dalam kehidupan bernegara. Dalam upaya menciptakan keadilan global, pandangan nasionalisme digunakan secara domestik melalui program-program pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan melalui jaminan sosial, bantuan pendidikan hingga peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Keadilan global akan dapat tercipta dengan menciptakan keadilan domestik terlebih dahulu, ini merupakan bentuk tanggung jawab antar sesama masyarakat dalam menghadirkan sebuah kesetaraan. Lain halnya dengan kosmopolitanisme yang memandang bahwa keadilan global dapat tercipta melewati batas-batas kedaulatan negara.

Dalam beberapa kasus, upaya kaum kosmopolitan yang mendorong distribusi keadilan secara global mengalami hambatan yaitu regulasi atau peraturan yang berbeda dari setiap negara. Sebagai contoh, distribusi bantuan bencana alam bagi korban yang berada dalam suatu wilayah negara harus melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh negara penerima sehingga hal tersebut tidak dianggap ilegal. Namun apa yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa banyak nilai universal yang dianut oleh umat manusia walaupun mereka berada di wilayah yang berbeda, agama yang berbeda dan suku yang berbeda.

Efek Moral dari Globalisasi

Globalisasi dengan segala hegemoninya menjadikan dunia berubah dengan sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan moral masyarakat. Era globalisasi mengubah gaya hidup (*life style*) warga negara (masyarakat) walaupun keadaan serba terbatas, tidak memungkinkan misalnya karena pengangguran maka segala cara dilakukannya sehingga agama dijadikan kedok demi meraih simpatikan sesamanya

dan yang paling hebatnya seseorang telah melakukan penyimpangan sikap melalui kekerasan. Walaupun yang menjadi korban tindakan kekerasan pada umumnya lingkungan keluarganya yang lemah dalam berpikir dan bertindak sehingga menyerah kepada keadaan nasib dirinya.

Penyimpangan melalui kekerasannya seperti diatas adalah bagian kecil dari tindakan kejahatan sebagai efek dari globalisasi. Sedangkan kejahatan perlu ditelusuri dengan mempergunakan pemikiran akal yang sehat. Ada beberapa penggolongan teori mengenai sebab terjadi perilaku menyimpang melalui kekerasannya seperti pendapat Kusumah (1984) mengenai *psychogenesis*, yang menekankan sebab-sebab dari tingkah laku dari aspek psikologis menekankan bahwa para pelanggar hukum memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Permasalahan di atas apabila dibiarkan semakin lama, akan mengarah kepada kejahatan yang besar. Sehingga sekarang ini masyarakat tidak bebas dari gangguan tekanannya. Untuk mengatasi gangguan dan tekanan penyimpangan dengan berbagai kekerasannya terhadap masyarakat luas. Maka sekarang ini tidak ada cara lain materi PKn harus disosialisasikan tidak saja hanya diajarkan untuk peserta didik saja, tetapi masyarakat pun harus diingatkan karena penyimpangan yang disertai kekerasan tidak saja terjadi dikalangan masyarakat umum saja, tetapi sudah merambah kepada lingkungan keluarga. Apabila dibiarkan maka akan mengarah kepada mala petaka kejahatan besar terlebih lagi rumah tahanan tidak mampu menampung penghuninya. Untuk apa suatu negara memiliki gedung-gedung yang tinggi dengan sarana dan prasarana yang bagus kalau saja warganya merasa tidak merasa nyaman. Kedamaian, kenyamanan yang pertama diperoleh dari lingkungan keluarga dulu. Keluarga lah yang pertama yang akan menghantar penghuninya ke arah kesuksesan supaya nantinya dapat menata karier kemudian dapat membangun negaranya (Horton, 1999).

Seorang manusia akan menjadi sukses dimulai dari keluarga yang tenteram, damai dan kondusif. Karena seorang manusia tidak saja dapat cukup hanya karena pangan saja tetapi tetap saja harus mencakup ketiga unsur lainnya yaitu pangan, sandang dan papan, dan juga nyaman, tenteram dan kondusif. Bagaimana seseorang dapat berkarya kalau saja di rumahnya tidak ada rasa aman, nyaman dan tenteram. Karena pusat pendidikan pertama dan utama dalam pembentukan karakter seseorang adalah keluarga di sinilah yang menjadi dasar bagi perkembangan kepribadian seseorang. Di dalam suatu keluarga diharapkan adanya kelangsungan pendidikan yang berfungsi untuk pembentukan kepribadian sebagai makhluk individu, sosial, susila dan makhluk keagamaan.

Dengan kata lain baik-buruknya tingkah laku seseorang tergantung kepada lingkungan atau kerabat keluarganya. Maslow mengembangkan teorinya bahwa kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan menjadi lima hierarki jenis kebutuhan diantaranya adalah (1) kebutuhan fisiologis, (2) kebutuhan akan keamanan; (3) kebutuhan kasih sayang; (4) kebutuhan akan penghargaan; dan (5) kebutuhan untuk aktualisasi diri. Dari kelima teori ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan seseorang berbeda tergantung dari berbagai faktor keadaan usia seseorang di saat itu. Seperti tingkat pendidikan, kedudukan, pengalaman, cita-cita, serta pandangan hidupnya. Karena kebutuhan sebagai suatu hierarki yang diartikan bahwa suatu saat kebutuhan akan fisiologis sudah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan keamanan, kebutuhan social akan mendesak apabila keamanan dapat dipenuhi. Demikian pada akhirnya kebutuhan akan aktualisasi diri akan muncul apabila kebutuhan lainnya telah terpenuhi. Begitu pula kebutuhan seseorang merupakan hierarki yang berkembang sesuai dengan keadaan dirinya. Oleh karena itu apabila semuanya sudah terpenuhi, maka keluarga tersebut hidupnya menjadi harmonis bagi penghuninya kemudian bagi lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya.

Dari berbagai gejala masyarakat terhadap pengaruh era globalisasi. Maka salah satu kuncinya pendidikan kewarganegaraan harus disosialisasikan secara edukatif melalui pertemuan rutin di lingkungan sekitar, kelurahan, atau tingkat kecamatan oleh aparat pemerintah setempat bersama Guru PKn. Cara tersebut adalah salah satu model pengajaran yang harus diterapkan supaya warga dari suatu negara lebih baik lagi, karena PKn ini harus diajarkan bukan untuk peserta didik saja tetapi masyarakat pun perlu diingatkan. Oleh karena itu PKn diajarkan kepada peserta didik di seluruh dunia karena *civic education* untuk di berbagai negara tujuannya untuk mengembangkan dan memperkuat tentang pemerintahan otonom (*self-government*) dan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan budaya dari negaranya. Adapun pemerintahan otonom demokratis berarti bahwa warganegaranya harus aktif dan terlibat dalam pemerintahannya itu sendiri, selainnya mereka jangan hanya sebagai warga negara saja dan tidak saja menerima kemudian didikte orang lain atau hanya memenuhi tuntutan orang lain saja.

Akan tetapi di dalam suatu negara yang demokratis yang sesungguhnya yaitu apabila warganegaranya dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya, berpikir secara kritis dan bertindak yang lebih baik sesuai dengan norma masyarakat (peraturan di masyarakat) di lingkungannya di dalam dunia yang plural selain dengan mempergunakan empati yang memungkinkan kita dapat pula peka dan peduli terhadap permasalahan di masyarakatnya. Untuk pelaksanaannya maka harus mengakomodasi pihak lain selain itu diperlukan adanya kemampuan yang memadai untuk pelaksanaannya

Perlu diketahui diperlukan partisipasi yang bermutu bagi warganegaranya selain ada tanggung jawab dalam kehidupan politik baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional karena warganegara yang demokratis kemungkinan akan mengadakan perubahan sosial. Globalisasi yang dipercepat oleh kemajuan teknologi mengubah dasar masyarakat, ekonomi dan kehidupan sosial. Masyarakat dan lingkungan kerja uang

semakin beragam dari segi bahasa, budaya, warisan dan lain sebagainya. Globalisasi menuntut warga negara berwawasan global. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan didesain untuk mempersiapkan warga negara muda mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan di luar dirinya sebagaimana Oxfam melihat *global citizen* sebagai seseorang yang “*aware of the wider world and has a sense of their own role as a world citizen; respects and values diversity; willing to act to make the world a more equitable and sustainable place; take responsibility for their action*” (Aulia, 2016; Education Above All, 2012).

Dengan meningkatnya akses terhadap jaringan internet semua menjadi serba *mobile* yang memungkinkan laporan atau informasi dari masyarakat (*citizen report*) menjadi cepat diakses oleh siapa pun. Syaratnya adalah setiap orang harus kemampuan kewarganegaraan digital (*digital citizenship*), yang membantu setiap orang memahami hak dan tanggung jawab mereka, mengakui manfaat dan risiko penggunaan sosial media dan menyadari akibat pada diri pribadinya serta etika di ruang digital, bertindak cerdas dan efektif dalam memanfaatkan media *online* digital tersebut.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan untuk di Indonesia bukanlah sebagai indoktrinasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Karena sudah seharusnya pendidikan kewarganegaraan menjadi bidang kajian kewarganegaraan yang berkaitan secara langsung dengan proses pengembangan warga negara yang demokratis selainnya sebagai pelaku-pelaku pembangunan bangsa yang memiliki sikap yang baik dan bisa bertanggung jawab di dalam aktivitas keseharian hidupnya di tengah-tengah masyarakatnya.

Warga negara yang baik atau kelompok keluarga tersebut dilarang memiliki penyimpangan sikap melalui kekerasannya, apalagi orang yang katanya mengaku beragama dan rajin beribadah, tetapi kenyataan tingkah laku keseharian tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam agamanya, apalagi bertindak kekerasan terhadap keluarganya sendiri. Sebagai pribadi

yang baik, buatlah kehadiran kita orang lain menjadi nyaman karena era globalisasi meskipun bagaimana tidak bisa dibendung tetapi yang terpenting sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki pertahanan yang kuat dari segala gejolak ancaman globalisasi. Hubungan yang semakin erat karena dunia digital saat ini mampu memberdayakan orang mengakses informasi tanpa batas, bergabung dalam berbagai komunitas, berkontribusi secara kreatif untuk memecahkan masalah-masalah. Jaringan internet telah mengubah cara kita berhubungan satu sama lain. Interaksi digital rutin dalam kehidupan sehari-hari, dan warga abad ke-21 diharapkan untuk berinteraksi tanpa kendala di ruang digital di mana warga negara muda belajar tentang isu-isu dan berpartisipasi dalam proses demokrasi, ekonomi dan perubahan sosial lainnya.

Simpulan

Di era globalisasi sekarang ini kita sebagai bagian dari warga dunia tidak dapat lagi menghindarkan segala pengaruh negatif maupun positifnya dari berbagai kemajuan teknologi komunikasi yang begitu cepat dan instan melalui berbagai macam alat kebutuhan aktivitas hidup yang modern serta menjanjikan. Sehingga kita dibuatnya penasaran dan tidak aneh jati diri bangsa semakin terkikis, terlebih Pendidikan kewarganegaraan hanya diberikan kepada peserta didik saja, sehingga warga negara menjadi lupa misi dan visi misi PKn. Karena yang paling terpenting sebagai masyarakat yang bermartabat haruslah memiliki benteng pertahanan untuk menangkalkan dari segala macam dampak pengaruh negatif era globalisasi seperti segala sesuatu harus dapat mempertimbangkan baik buruknya selain segala sesuatu harus ada nilai-nilai agama yang telah kita anut.

Referensi

Aulia, S. S. (2016). Pembentukan wawasan global mahasiswa dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di FKIP Universitas Ahmad Dahlan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(1), 66–81.

- Bîrzéa, C. (2000). *Education for democratic citizenship: A lifelong learning perspective. Project On "Education for Democratic Citizenship"* (Vol. 21). Strasbourg.
- Doğanay, A. (2012). A curriculum framework for active democratic citizenship education. In M. Print & D. Lange (Ed.), *School, curriculum and civic education for building democratic citizens* (hal. 19–39). Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publisher.
- Education Above All. (2012). *Education for global citizenship. Childhood Education*. Doha Qatar: Education Above All.
- Gerzon, M. (2010). *Global Citizens: How our vision of the world is outdated, and what we can do about it*. London: Random House.
- Giddens, A. (2000). *Jalan ketiga pembaruan demokrasi sosial*. (K. A. Mahardika, Penerj.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Glatthorn, A. A. (1999). Curriculum alignment revisited. *Journal of Curriculum and Supervision*, 15(1), 26.
- Grossman, D. L., Lee, W. O., & Kennedy, K. J. (Ed.). (2008). *Citizenship curriculum in Asia and Pacific*. Hong Kong, China: Springer.
- Horton, P. B. (1999). *Sosiologi*. (Aminudin, Penerj.) (6 ed.). Jakarta: Erlangga.
- Kennedy, K. J. (2009). Rethinking the citizenship education curriculum: How to meet the needs of twenty-first century citizenship. In *Chair Professors, Public Lecturer Series* (hal. 1–31). Hong Kong: The Hong Kong Institute of Education. Diambil dari <http://repository.lib.ied.edu.hk/jspui/handle/2260.2/9919>
- Kerr, D. (1999). *Citizenship education: an international comparison*. London: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Kusumah, M. W. (1984). *Kriminologi dan masalah kejahatan (Suatu pengantar ringkas)*. Bandung: Armico.
- Lee, W. O., Grossman, D. L., Kennedy, K. J., & Fairbrother, G. P. (Ed.). (2004). *Citizenship education in Asia and the Pacific. concepts and issues*. Hong Kong, China: Springer.
- Mir, U. R., Hassan, S. M., & Qadri, M. M. (2014). Understanding globalization and its future: An analysis. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 34(2), 607–624.
- National Council for Social Studies. (1994). *Expectances of excellence: curriculum standards for social studies*. Washington DC: NCSS.
- NCSS. (1994). *National standards for civics and*

- government*. California: Center for Civic Education.
- Oxfam. (2015). *Education for global citizenship. A guide for school*. Oxford: Oxfam GB.
<https://doi.org/10.1002/9781444307214.ch6>
- Print, M. (1999). Introduction civic education and civil society in the Asia-Pacific. In M. Print, J. Ellickson-Brown, & A. R. Baginda (Ed.), *Civic Education for Civil Society* (hal. 9–18). London: ASEAN Academic Press.
- Zed, M. (2004). *Metode peneletian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.